



Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020

Kumba Digidowiseiso ¹⁾, Muhammad Bahtiar Satrio ²⁾

¹⁾Program Studi S1 Manajemen Universitas Nasional, kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

²⁾Program Studi S1 Akuntansi Universitas Nasional, muhammadbahtiaratrio@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci :
Rasio
Kemandirian
Keuangan
Daerah, Rasio
Ketergantungan
Fiskal, Indeks
Pembangunan
Manusia

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan sampel jenuh yang didapati 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan model estimasi Fixed Effect yang terpilih sebagai model estimator terbaik. Analisis data penelitian ini menggunakan program computer STATA/MP Versi 16. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio ketergantungan fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

Keywords :
Regional
Financial
Independence
Ratio, Fiscal
Dependency
Ratio, Human
Development
Index

The purpose of this study is to determine the effect of the ratio of regional financial independence and the ratio of fiscal dependence on the human development index in South Kalimantan Province in 2014-2020. Sampling was carried out with saturated samples found in 13 districts and cities in South Kalimantan Province. This research method uses panel data regression method and Fixed Effect estimation model which was selected as the best estimator model. Data analysis of this study used the STATA/MP Version 16 computer program. The results of the study stated that the ratio of regional financial independence had a negative and significant effect on the Human Development Index. Fiscal dependency ratio has a negative and insignificant effect on the human development index

PENDAHULUAN

Pembaharuan sektor publik dalam pembangunan daerah sangat penting ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Namun, pembangunan nasional tidak terlepas dari asas otonomi daerah yang memberikan harapan guna peningkatan kinerja institusi daerah dalam usaha untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadikan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan desentralisasi. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah diberi

wewenang tugas-tugas yang perlu direalisasikan. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dilukiskan pada Indeks Pembangunan Manusia yang tergantung pada pemerintah yang sebagai sarana penunjang. Diukurnya Pembangunan Manusia dapat dilihat dengan angka indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia ialah indeks pengukuran pencapaian pembangunan suatu negara pada kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan (Todaro & Smith, 2011).

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pada penganggaran pelayanan publik yaitu kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Dalam menganggarkan seluruh itu pemerintah daerah sangat bergantung terhadap penerimaan pendapatan daerah yang asalnya dari Pendapatan Asli daerah, Dana Transfer, dan Dana Lainnya. Pemerintah biasanya menggunakan pendapatan ini digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan tentu saja ini akan terlaksana jika penyaluran hanya berfokus pada penyaluran dana yang dirogoh hanya untuk kepentingan masyarakat yang berakibat kesejahteraan masyarakat bisa makmur.

Di Indonesia terdapat 34 Provinsi Tetapi, pada tahun 2020 Ideks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih tergolong rendah, yaitu masih menempati posisi dibawah Indeks Pembangunan Manusia nasional. Pada 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia, masih terdapat 11 provinsi yang Indeks Pembangunannya dibawah Indeks Pembangunan Manusia nasional dan 23 Provinsi yang Indeks Pembangunan Manusianya di atas Indeks Pembangunan Manusia nasional. Provinsi Kalimantan Selatan masih tergolong pada 11 provinsi yang Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah angka Indeks Pembangunan nasional. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dan juga penyaluran dana perimbangan yang cukup banyak terhadap daerah dari pemerintah pusat sehingga bisa mempercepat peningkatan berkelanjutan pada Indeks Pembangunan Manusia.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator dalam mengukur kemandirian suatu daerah terhadap pemerintah pusat yang kaitannya dengan tercapainya otonomi daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ialah rasio yang menandakan pelayanan dan pembangunan pada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi yang digunakan untuk pendapatan daerah yang diperlu daerah. Anggaran pada bidang infrastruktur publik dianggarkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat pada bidang kesejahteraan yang mana akan terlaksana efisiensi dan akan meningkatkan pembangunan manusia (Delavallade, 2006).

Kesejahteraan adalah sistem suatu bangsa yang kaitannya dengan memanfaatkan jasa untuk membantu masyarakat (Whitaker & Federico, 1997). Rasio ketergantungan daerah ialah perbandingan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang didapat pada daerah itu yang menandakan semakin tinggi rasio ketergantungan suatu daerah sehingga semakin tinggi juga tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2010:128).

Hasil penelitian yang dilakukan Mauludin & Dewi (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh dengan IPM kabupaten/ kota Provinsi Banten. Kemudian hasil penelitian Arafat et al. (2020) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan Publik

Menurut Digdowiseiso (2015:1-2), keuangan publik ialah ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah yang memberikan penjelasan tentang belanja publik dan cara-cara yang dipergunakan oleh pemerintah dalam membiayai belanja itu. Didalam keuangan publik turut menganalisis pengeluaran publik guna mempermudah dalam memahami tujuan suatu jasa perlu disediakan oleh pemerintah dan negara menggandalkan pada beberapa jenis pajak. Tujuan dari keuangan publik ialah mempelajari belanja pemerintah dan pendapatan dan juga melaksanakan analisis yang berkaitan berdasarkan suatu kegiatan belanja dan pendapatan pada pengalokasian sumber daya, mendistribusikan stabilitas ekonomi dan pendapatan. Keuangan publik kaitannya erat dengan pengambilan keputusan oleh pemerintah, dengan alasan setiap keputusan mempunyai akibat pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta.

Teori Federalisme

Menurut Prasetya (2012), teori Federalisme fiskal ialah sebuah teori yang menerangkan suatu hubungan desentralisasi dengan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Wujud pemerintahan federalisme fiskal merupakan salah satu struktur tingkatan pemerintah yang setiap tingkatan memperoleh tanggung jawab dan mendapatkan sumber yang asalnya dari pendapatan. Maka federalisme fiskal itu adalah salah satu unit asas pedoman yang ditetapkan di suatu negara maupun daerah guna mempersiapkan keuangan tingkat nasional dan pemerintah daerah. Didalam rancangan federalisme fiskal yang diartikan ialah pada tingkat pemerintahan II (kota/kabupaten) yakni kepanjangan tangan yang asalnya dari pemerintah pusat dengan sebutan lainnya di sebuah negara bagian yang berupa federal yang mana pemerintahan negara bagian bukan seperti pelaksana otonom.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai proses perluasan pilihan untuk penduduk (*enlarging people choice*). IPM adalah indikator penting yang berguna dalam mengukur keberhasilan yang berupaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk/masyarakat). IPM menjelaskan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan guna memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. IPM dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode perhitungannya direvisi pada tahun 2010 BPS mengadopsi perubahan metodologi perhitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010 (BPS, 2020). Manusia ialah kekayaan bangsa yang sebenarnya. telah seharusnya jika manusia menjadi yang utama pada pembangunan. Berhasilnya pembangunan memang seharusnya tidak hanya diukur pada tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga peningkatan kualitas manusianya.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (2001), rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjelaskan tingkat kemampuan pada daerah tertentu saat menganggarkan kegiatan pemerintah, pelayanan dan pembangunan ke masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang digunakan pada daerah. Rasio kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan pada besarnya Pendapatan Asli Daerah yang membandingkan dengan

Pendapatan Daerah yang asalnya dari sumber lain (Pendapatan Transfer) ialah Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Bagi hasil pajak, Alokasi khusus, Dana alokasi umum, dana darurat dan pinjaman.

Ketertanggung Fiskal

Menurut Kuncoro (2004), persoalan yang kerap terjadi berkaitan berdasarkan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi ialah cara daerah memungkinkan untuk menangani ketertanggungannya dalam pemerintah pusat guna kewenangan keterlibatannya fiskal guna kebutuhan semua kesibukan pembangunan daerah. Instrumen penting dalam menyambangi otonomi daerah dalam keberhasilannya otonomi daerah tidak terbebas dari keandalannya di bidang keuangan. Pemerintah daerah mengupayakan untuk merealisasikan jalannya pemerintahan atas efisiensi dan efektifitas guna tercapainya peran antara masyarakat dalam pembangunan, juga peningkatan kesejahteraan guna peningkatan keadilan dan pemerintahan. Agar terlihatnya keterkaitan fiskal pemerintah daerah perlu dilaksanakan dengan pengukuran kesiapan pemerintah daerah guna pengukuran kinerja/ kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih khusus pada bidang keuangan, yang bisa diukur berdasarkan mampunya dalam penganggaran yang bila didanai seluruhnya oleh pendapatan asli daerah dan bagi hasil.

Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tercapainya salah satu identifikasi daerah guna pengelolaan anggaran daerah ialah dengan mengamati kemandirian keuangan daerah itu. Yang dimana salah satu daerah bisa dikatakan mandiri di persoalan keuangan, keinginan pada masa yang akan datang perlu adanya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan terhadap masyarakat tanpa perlu adanya keterkaitan antara transfer dana dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Amalia & Purbadharmaja (2014) tentang rasio kemandirian dan rasio keserasian alokasi belanja terhadap IPM yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah keseluruhan belanja daerah. Apabila tingkat angka rasio kemandirian keuangan daerah tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kemandiannya.

H_1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hubungan Ketertanggung Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Guna pelaksanaan otonomi daerah, perlunya pemerintah daerah untuk mengetahui kesanggupan daerah itu punya guna peningkatan pendapatan asli daerah, yang nantinya tentu saja tidak tergantung kepada penyaluran pemerintah pusat. Dapat di ukurnya rasio ketertanggung fiskal yaitu dengan rumus membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah berdasarkan total penerimaan daerah itu. Jika tingkat ketertanggung suatu daerah semakin tinggi kepada penerimaan alokasi dari pemerintah pusat sehingga rasio ketertanggung akan semakin tinggi. Jika suatu daerah mempunyai rasio ketertanggung keuangan daerah yang kecil atas transfer pemerintah pusat sehingga didapati uraian bahwa daerah itu memiliki peran anggaran yang baik dan dapat dikatakan mandiri. Dengan kondisi keuangan yang sehat sehingga dapat diketahui

bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang berimbas terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

H₂ : Ketergantungan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data panel, yaitu sebuah kombinasi antara data cross section dengan time series. Sumber data yang digunakan data sekunder. Yang mana data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten/ Kota dalam periode 2014-2020. Data sekunder pada penelitian ini sumbernya dari data publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkeu) dan data Indeks Pembangunan Manusia yang diunduh melalui instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Balangan, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Barito Kuala, Kab. Tabalong, Kab. Kotabaru, Kab. dan Hulu Sungai Utara. Sampel pada penelitian ini ialah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan data Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan selama 7 tahun dari 2014-2020.

Pengukuran Variabel

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrika indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Perhitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks (BPS, 2020).

$$PM = \sqrt[3]{Kesehatan \times Pendidikan \times Pengeluaran} \times 100\%$$

Rasio kemandirian diketahui oleh PAD terhadap total pendapatan yang mempunyai arti Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah (DJPK-Kemenkeu, 2011).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan daerah ialah perbandingan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang didapat pada daerah itu yang menandakan semakin tinggi rasio ketergantungan suatu daerah sehingga semakin tinggi juga tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2010:128).

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, alat analisis yaitu regresi data panel untuk mengetahui hubungan antara variabel independen Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia dengan pogram STATA 16 MP.

Setelah itu dilakukan statistik deskriptif, pemilihan model common effect model, fixed effect model dan random effect model, uji chow, uji lagrange multiple, uji hausman, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, autokorelasi, uji F dan uji t.

Regresi Model data panel pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y_{it} : Indeks Pembangunan Manusia
- β_0 : konstanta
- β_1, β_2 : koefisien X_1, X_2
- X_{1it} : rasio kemandirian daerah (persen)
- X_{2it} : rasio ketergantungan fiskal (persen)
- ϵ_{it} : variabel gangguan (error)

PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
IPM	91	0.69	0.04	0.61	0.80
IDPR	91	0.11	0.04	0.04	0.23
DEPFR	91	0.71	0.05	0.59	0.84

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel diatas terdapat 13 sampel yang diteliti dengan kurun waktu 7 tahun dimulai pada tahun 2014 sampai 2020, yang mana total observasi yang dilaksanakan berjumlah 91 observasi. Beralasan hasil pengolahan pada tabel di atas, variabel Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen memperoleh angka *mean* sebesar 0.69 dengan standar deviasi sebesar 0.04 persen. Dengan nilai maksimal di angka 0.80 yang terdapat pada Kota Banjar Baru pada tahun 2019 dan juga nilai minimum 0.61 yang terdapat pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2014. Besarnya nilai standar deviasi Indeks Pembangunan Manusia yang nilainya 0.04 yang mengartikan bahwa tingkat variasi data yang kecil dengan kata lain tidak mempunyai kesenjangan yang cukup tinggi bagi indeks pembangunan manusia dalam maksimal dan minimal.

Pada variabel kemandirian keuangan daerah (*IDPR*) sebagai variabel independen pertama memperoleh angka mean sebesar 0.11, nilai maksimumnya sebesar 0.23 yang terdapat di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 dan juga nilai minimum memperoleh angka 0.04 yang terdapat di Kab Balangan pada tahun 2016. Angka standar deviasi kemandirian keuangan daerah ialah 0.04 lebih rendah dari angka mean yang berarti bahwa variabel kemandirian keuangan daerah mempunyai tingkat variasi data yang kecil dengan kata lain tidak mempunyai kesenjangan yang cukup tinggi bagi rasio kemandirian keuangan daerah maksimal dan minimal.

Pada variabel ketergantungan fiskal (*DEPFR*) sebagai variabel independen ke dua memperoleh angka mean sebesar 0.71, nilai maksimumnya sebesar 0.84 yang terdapat

pada Kabupaten Balangan pada tahun 2016 dan juga nilai minimumnya memperoleh angka 0.59 yang terdapat di Kota Banjarmasin pada tahun 2014. Angka standar deviasi ketergantungan fiskal ialah 0.05 lebih rendah dari angka mean yang berarti bahwa variabel ketergantungan fiskal mempunyai tingkat variasi data yang kecil. Dengan kata lain tidak mempunyai kesenjangan yang cukup tinggi bagi rasio ketergantungan fiskal maksimal dan minimal.

Tabel 2. Hasil Pengujian Uji Chow

Probability F- Restricted	0.00
α	0.05

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji Chow yang dilaksanakan mengartikan bahwa angka probabilitas senilai 0.00 yang memberikan hasil signifikan karena nilai tersebut lebih rendah dari α 0.005 ($0.00 < 0.05$), sehingga kesimpulannya adalah hasil pengujian menolak H_0 dan menerima H_a , yaitu model *Fixed Effect*.

Tabel 3. Hasil Pengujian *Lagrange Multiple*

Prob > chibar2	0.00
α	0.05

Sumber: Data, diolah 2021

Pengujian uji Lagrange Multiple menerangkan bahwa dalam hasil itu mempunyai Prob > chibar2 senilai 0.00 yang artinya lebih kecil dari 0.005 ($0.00 < 0.005$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian Lagrange Multiple menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti memihak pada model *Random Effect*.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hausman

Prob > Chi2	0.00
α	0.05

Sumber: Data, diolah 2021

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan uji Hausman menghasilkan bahwa Prob > chi2 senilai 0.00 yang lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$), sehingga dapat diambil kesimpulan H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti memihak pada model *Fixed Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>Shapiro Wilk test for normal data</i>					
Variabel	Obs	W	V	z	Prob>z
Res	91	0.99	1.02	0.06	0.47

Sumber: Data diolah, 2021

Pengujian uji normalitas yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa $Prob > z$ senilai 0.47 yang nilainya lebih besar dari α 0.05 ($0.47 > 0.05$), sehingga kesimpulannya bahwa nilai dari data yang telah dikumpulkan terdistribusi secara normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
DEPFR	1.84	0.54
IDPR	1.84	0.54
Mean VIF	1.84	

Sumber: Data diolah, 2021

Pengujian uji multikolinearitas yang telah dilaksanakan memberitahukan bahwa besarnya nilai Tolerance ($1/VIF$) pada semua variabel ialah lebih dari 0.10 dan juga pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak ditemukannya satu variabel yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Yang artinya bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Chi2 (13)	38.76
Prob > Chi2	0.00

Sumber: Data diolah, 2021

Pengujian heterokedastisitas yang sudah dilaksanakan menghasilkan nilai $prob > chi2$ senilai 0.00 yang mempunyai makna bahwa lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$), sehingga bisa diartikan pada data panel terdapat masalah heterokedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Tabel 8. Hasil Uji F

Prob > chi2	0.00
α	0.05

Sumber: Data diolah, 2021

Bersumber pada pengujian regresi yang sebelumnya telah dilakukan sehingga di peroleh hasil $Prob > Chi2$ senilai 0.00, angka itu bertepatan pada signifikasnsi $< \alpha = 0.05$, sehingga bisa di artikan bahwa model yang dipakai dalam penelitian ini *fit* dengan data.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IDPR	0.18*** (0.04)		0.05* (0.09)	-0.07** (0.03)	0.05* (0.09)	-0.07** (0.03)
DEPFR		-0.13*** (0.03)	-0.11*** (0.05)	-0.03** (0.01)	-0.11** (0.05)	-0.03** (0.01)
_cons	0.66	0.78	0.04	0.70	0.77	0.70
Observasi	91	91	91	91	91	91
Group	13	13	13	13	13	13

Variabel Independen	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Within R-squared</i>	0.07	0.17	0.17	0.96	0.17	0.96
<i>Year Effect</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
<i>District/ City Effect</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya
<i>F-value</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Data diolah, 2021

Keterangan: Angka dalam kurung adalah angka robust standard error. Tanda *** menunjukkan koefisien signifikan pada taraf 1 persen, tanda ** menunjukkan koefisien signifikan pada taraf 5 persen, dan tanda * menunjukkan koefisien signifikan pada taraf 10persen.

Secara ekonometrika, hubungan antara kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan bisa dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$IPMit = 0.70 - 0.07IDPRit - 0.11DEPFRit + \epsilon it$$

Uji Koefisien Deteriminasi R²

Dalam penelitian ini, besarnya angka koefisien determinasi R² yang menggunakan model Fixed Effect dapat tercermin dari R-square within yang terdapat di tabel 9. Besarnya angka R-square yang didapat senilai 0.96 yang bermakna kemampuan variabel Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Fiskal dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia senilai 0.96 atau 96%, sedangkan sisanya sebesar 4% lainnya dijelaskan pada variabel lain selain dari variabel penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	Robust		
	Coef	Std. Error	Pob
IDPR	-0.07	0.03	0.04
DEPFR	-0.03	0.01	0.07

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Uji t Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tabel 10 dapat dijelaskan bahwa variable kemandirian keuangan daerah yang telah diuji mendapatkan koefisien sebesar -0.07 dengan nilai signifikansi sebesar 0.04. Nilai probabilitas lebih rendah pada level signifikansi 5% (0,04 < 0,5). Keputusan yang bisa diambil ialah menerima Hipotesis H1. Kesimpulan dari hasil uji t dari variabel IDPR mempunyai kaitan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2014-2020.

Hasil Uji t Ketergantungan Fiskal

Pada tabel 10 dapat dijelaskan bahwa variabel ketergantungan fiskal yang telah diuji mendapatkan koefisien sebesar -0.3 dengan nilai signifikansi sebesar 0.07. nilai probabilitas lebih besar dari level signifikansi 5% ($0.07 > 0.05$). Keputusan yang dapat diambil adalah Hipotesis H2 ditolak. Sehingga kesimpulan dari hasil uji t dari variabel DEPFR bahwa DEPFR mempunyai kaitan yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2014-2020.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berlandaskan hasil penelitian ini diketahui pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia mempunyai angka koefisien sebesar -0.07 dengan nilai p-value senilai 0.04. Hasil yang didapat mengartikan bahwa secara langsung kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan dengan taraf 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014 sampai dengan 2020. Hal ini menandakan kemandirian keuangan daerah pada saat mengalokasikan semua kegiatan pemerintah belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sarana kesehatan dan pendidikan terselenggara belum maksimal. Ketika terjadi kenaikan satu persen pada rasio kemandirian keuangan daerah sehingga menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0.07 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hubungan positif ini akan terlaksana jika kemandirian daerah naik yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah sehingga dalam proses pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat akan segera terealisasi. Nilai P-value yang dimiliki sebesar 0.04 yang memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel indeks pembangunan manusia karena lebih kecil dari 0.05.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Evelyn & Rahayu (2018) bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan yang tinggi bisa menurunkan kualitas layanan publik pada masyarakat, yang beralasan anggaran yang dipunyanya di gunakan dalam menjalankan pos belanja operasi, dalam lancarnya penyelenggaraan layanan publik untuk mempertahankan layanan publik yang baik perlu dana. Bila dana untuk pemeliharaan layanan publik tidak bisa tercukupi, sehingga bisa menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah daerah sehingga indeks pembangunan manusia akan turun.

Pengaruh Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berlandaskan hasil penelitian ini diketahui pengaruh ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia mempunyai angka koefisien sebesar -0.03 dengan nilai p-value senilai 0.07. Hasil yang didapat mengartikan bahwa secara langsung ketergantungan fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Ketika terjadi kenaikan satu persen pada ketergantungan fiskal sehingga akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.03 dengan asumsi variabel lain konstan. Yang berarti keadaan ketergantungan fiskal di provinsi Kalimantan selatan ini termasuk kedalam kategori kurang baik yang menggambarkan bahwa dalam pengelolaan kinerja potensi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah berjalan tetapi belum maksimal, yang mana peningkatan ketergantungan fiskal

yang kurang baik sehingga menyebabkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan akan terjadi penurunan.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Arafat et al. (2020) bahwa ketergantungan fiskal di daerah tersebut buruk karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat yang digunakan guna pelayanan publik untuk masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan bisa dikategorikan sebagai daerah yang belum mandiri guna terlengkapinya kebutuhan daerah. Kenaikan kualitas ketergantungan fiskal yang buruk hanya bisa menyebabkan indeks pembangunan manusia menurun, tentu saja ini menggambarkan kinerja pemerintah yang masih kurang baik, sehingga pemerintah daerah harus mulai mengantisipasi guna pengaturan kebijakan yang terarah dan efektif yang utama dalam manajemen keuangan daerah.

KESIMPULAN

Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah sehingga akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Kinerja pemerintah yang kurang baik menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan juga dalam pengoptimalan pemasukan. (2) Rasio ketergantungan fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tentu saja dengan ini mengartikan bahwa terjadinya kenaikan ketergantungan fiskal sehingga akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Dalam pengorganisir strategi dan kebijakan yang cocok dalam terwujudnya pelayanan yang andal bagi masyarakat Pemerintah Kalimantan Selatan masih belum sepenuhnya dalam pengalokasian finansial di daerahnya. Tentu saja hal ini yang berakibat pada masih ketergantungannya pemerintah daerah pada pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Firda Rizky & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6]: 257-264, 3(6), 258–264. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/bd87a4168b7721381fa238c05ebbd77.pdf
- Arafat, L., Wiwiek Rindayati, & Sahara. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 140–158. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.140-158>
- BPS Kaltim. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–8. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Delavallade, C. (2006). Corruption and distribution of public spending in developing countries. *Journal of Economics and Finance*, 30(2), 222–239.

- Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik* (M. S. Prof. Dr. H. Eko Sugiyanto (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) Jl. Sawo Manila, No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.
- DJPK-Kemenkeu. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=2145>
- Evlyn, M., & Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(32), 1–15.
- Kuncoro, H. (2004). Ekonomi Pembangunan Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47–63.
- Mahmudi, M. (2010). *Analisis Laopran Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik: Bagian VII Teori Fiskal Federalisme. *Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNIBRAW*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 10*. Erlangga, Jakarta.
- Whitaker, W. H., & Federico, R. C. (1997). *Social welfare in today's world*. McGraw-Hill Humanities, Social Sciences & World Languages.
- Widodo, J. (2001). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. *Malang: CV. Citra Malang*.